

Wali Kota Kupang Kukuhkan Pengurus Dekranasda 2025-2030, Momen Penting Dorong UMKM dan Tenun Lokal



Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang Masa Bakti 2025-2030 yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Rabu (26/03).

Acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong perkembangan industri kerajinan dan UMKM di Kota Kupang.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., Ketua Dekranasda Kota Kupang yang baru dilantik, Ny. dr. Widya Cahya, serta Penjabat Ketua Dekranasda sebelumnya, Ny. Angela Lusi Deran, S.Ak.

Selain itu, hadir pula para Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah terkait, serta pengurus Dekranasda yang baru dikukuhkan.

Prosesi pengukuhan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan antara Ny. Angela Lusi Deran, S.Ak., dan

Ny. dr. Widya Cahya. Serah terima ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Kupang selaku Ketua Pembina Dekranasda dan Wakil Wali Kota Kupang sebagai Penasehat Dekranasda.

Selain itu, dilakukan pula serah terima Memori Dekranasda sebagai landasan kesinambungan program kerja ke depan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan dan pengukuhan pengurus Dekranasda Kota Kupang Masa Bakti 2025-2030.

Dalam kepengurusan yang baru, Ny. dr. Widya Cahya resmi menjabat sebagai Ketua, didampingi oleh Ny. Angela Lusi Deran, S.Ak. sebagai Wakil Ketua, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang sebagai Ketua Harian.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dan industri tenun lokal.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama Gubernur NTT baru-baru ini melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menjalin kerja sama dengan kementerian terkait dan Gubernur DKI Jakarta.

Salah satu hasil dari kunjungan tersebut adalah upaya memfasilitasi pemasaran produk tenun Kupang di Jakarta melalui pameran atau expo, tanpa membebani para pengrajin dengan biaya perjalanan yang tinggi.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Kupang akan membeli langsung kain tenun dari para pengrajin, tanpa perantara atau sistem titipan.

Ia juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kupang untuk membeli tenun asli dari Dekranasda Kota Kupang guna mendukung kesejahteraan para perajin.

“Kita harus memastikan bahwa pengrajin kita mendapatkan manfaat secara langsung. Karena itu, saya ingin semua ASN di Kota Kupang membeli tenun dari Dekranasda. Dengan begitu, kita

tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para perajin,” tegas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan Dekranasda agar organisasi ini tidak hanya sekadar menjalankan program kerja, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Ia berharap dalam lima tahun ke depan, Dekranasda bisa menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing produk unggulan UMKM Kota Kupang.

“Dekranasda bukan hanya tentang seremoni atau kegiatan rutin. Ini adalah wadah yang harus benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Kupang. Kita harus bekerja lebih profesional, lebih inovatif, dan lebih berdampak,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama membangun Dekranasda sebagai bagian dari pembangunan Kota Kupang yang berkelanjutan.

Acara pengukuhan diakhiri dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh pengurus baru, menandai dimulainya langkah baru Dekranasda Kota Kupang dalam memperkuat industri kerajinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah ini. ***

BGN Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di NTT,

Pastikan Standar dan Manfaat Terjaga



Kupang, nwartapedia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Tim Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) telah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini berlangsung pada 24-26 Maret 2025, dengan fokus utama memastikan bahwa dapur-dapur MBG beroperasi sesuai dengan standar dan prosedur BGN, baik dari aspek administrasi, kesiapan dapur, kualitas gizi, maupun dukungan dari yayasan dan mitra.

Tim Sistakol BGN yang dipimpin oleh RB. Nuriana Alim Putra, didampingi oleh Hurin Safira dan Raisha Azizahra S, mengunjungi sejumlah dapur MBG di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), dan Belu.

Selain mengevaluasi kesiapan dapur yang akan mulai beroperasi pada April 2025, kunjungan ini juga menjadi ajang diskusi dengan para mitra dan yayasan mengenai implementasi program di daerah.

Selama kunjungan, RB. Nuriana Alim Putra menekankan pentingnya standar BGN dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG, mulai

dari infrastruktur dapur, proses persiapan makanan, hingga distribusi ke penerima manfaat.

“Kami ingin memastikan bahwa dapur-dapur MBG di NTT beroperasi sesuai standar BGN. Tidak hanya dari segi fisik bangunan dan alur kerja di dapur, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak memiliki kandungan gizi yang optimal,” jelasnya.

Di sisi lain, Hurin Safira menegaskan bahwa setiap dapur wajib mengikuti SOP kesehatan dan gizi, dengan pendampingan langsung dari ahli gizi.

“Kami mengingatkan agar ada komunikasi yang baik antara pengelola dapur dan tenaga gizi. Setiap bahan makanan yang diproses harus tetap bernilai gizi hingga sampai ke penerima manfaat,” katanya.

Selain pemantauan teknis, tim BGN juga berdiskusi dengan yayasan dan mitra di daerah untuk memahami tantangan serta peluang dalam pelaksanaan program MBG di wilayah NTT.

Tim Sistakol melakukan kunjungan ke berbagai dapur selama tiga hari, dimulai dari Kota Kupang yang mencakup dapur Kelapa Lima 1, Oesapa, Kelapa Lima 2, Oebobo 2, Oebobo 1, dan Alak.

Pada hari kedua, tim bergerak menuju Kabupaten TTS untuk meninjau dapur Soe Kota, kemudian ke Kabupaten TTU dengan mengunjungi dapur Naiola Bikomi Selatan, Yabiku, dan Maubesi Insana, sebelum akhirnya menutup hari dengan dapur Beirafu Kota Atambua di Kabupaten Belu.

Di hari ketiga, tim menyelesaikan evaluasi di Kabupaten Belu, dengan mengunjungi dapur Kuneru, Fatubenao, Motabuik, Kimbana, dan Raimanuk.

Para pengelola dapur dan mitra MBG menyambut baik kunjungan tim BGN, yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kelancaran program di daerah.

Fatima Luan, pengelola dapur Fatubenao, mengaku antusias dengan evaluasi yang dilakukan langsung oleh tim BGN.

“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Pak Putra dan tim sudah melihat langsung kondisi dapur, memberikan masukan dan arahan agar kami bisa menyesuaikan dengan standar BGN. Kami siap melakukan perbaikan, terutama dalam alur proses kerja di dapur,” ujarnya.

Fatima juga menekankan bahwa MBG bukan hanya memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar.

“Kami sudah mulai mengajak warga untuk menanam sayur yang nantinya bisa dipasok ke dapur MBG. Selain itu, program ini jelas membawa manfaat bagi anak-anak dari segi gizi,” tambahnya.

Sementara itu, Januarita Ewalde Berek, mitra dapur Raimanuk, mengapresiasi dukungan BGN dalam menghadirkan dapur di wilayahnya.

“Kami baru mulai membangun dapur, dan program ini benar-benar akan bermanfaat bagi anak-anak kami, terutama mereka yang tinggal di perbatasan dengan Timor Leste. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah, khususnya dari Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Kegiatan Monev ini juga didampingi oleh berbagai perwakilan terkait, seperti Fransiskus C. Teda (PIC dapur MBG se-Flores Raya), Kristo Tpooy (perwakilan SPPI NTT), Jim Sarmento (perwakilan mitra MBG Kota Kupang), dan Isidorus Lilijawa (tim media BGN zona NTT).

Dengan evaluasi ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak serta masyarakat di NTT.

#BGN #MakanBergiziGratis #NTT #MBG #GiziUntukAnak. ***

**PWI NTT Gelar Diskusi Publik,
Bahas Komitmen Pemerintah
Daerah dalam Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi**



Kupang, nwartapedia.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus HUT ke-79 PWI. Acara yang bertajuk “Membedah dan Mengawal Visi Ekonomi Kepala Daerah di NTT” ini berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, pada Senin, 24 Maret 2025.

Diskusi ini dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, kepala daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan berbagai institusi.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena mengapresiasi PWI NTT atas terselenggaranya diskusi publik ini. Menurutnya, diskusi semacam ini memberikan kontribusi besar dalam mengawal visi ekonomi kepala daerah di NTT.

“Apresiasi kepada teman-teman wartawan yang menyelenggarakan

diskusi ini dan juga selamat ulang tahun kepada PWI yang telah memasuki usia ke-79,” ujar Gubernur Melki.

Ia menekankan bahwa NTT terus membuka peluang investasi yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita semua harus berbenah agar investasi yang masuk dapat dikelola dengan baik. Kami juga telah melakukan pertemuan dengan para menteri di Jakarta untuk menyelaraskan program pembangunan di NTT dengan dukungan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Melki juga menyoroti kesepakatan bersama kepala daerah di NTT untuk mempercepat pembangunan Mall Pelayanan Publik yang ditargetkan beroperasi paling lambat Juni 2025.

“Mall Pelayanan Publik akan menjadi pusat layanan perizinan usaha yang lebih profesional dan transparan, sehingga dapat mendorong investasi dan kewirausahaan di NTT,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang, menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

“PWI NTT juga menyoroti pentingnya pemberitaan yang berkualitas dan sesuai kode etik jurnalistik, mengingat masih ada kasus-kasus pelanggaran yang sedang ditangani Dewan Pers,” ungkap Hilarius.

Diskusi ini menghadirkan empat pembicara utama, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang Ignasius Repelita Lega, Deputy Kepala Perwakilan BI NTT Pratyaksa Candraditya, Plt Direktur Utama Bank NTT Yohanes Landu Praing, serta pengamat ekonomi Frits O. Fanggidae.

Acara ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di NTT. ***

Mantan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes Meninggal Dunia dalam Insiden Laut di Oebubun



Kefamenanu, nwartapedia.com – Mantan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) dua periode, Raymundus Sau Fernandes, ditemukan meninggal dunia setelah perahu lampara yang digunakannya untuk memancing tenggelam di perairan Oebubun, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, pada Rabu (26/3).

Tragedi ini terjadi ketika Raymundus bersama beberapa rekannya memancing di tengah laut.

Namun, cuaca buruk dan gelombang tinggi menyebabkan perahu mereka kehilangan keseimbangan dan akhirnya tenggelam.

Tim SAR, aparat kepolisian, serta masyarakat setempat segera

melakukan pencarian intensif.

Setelah beberapa jam pencarian, jasad Raymundus ditemukan di area laut yang dikenal sebagai “Kolam Tua” dalam kondisi tak bernyawa.

Raymundus Sau Fernandes merupakan sosok yang dihormati dan dicintai masyarakat TTU.

Lahir pada 31 Agustus 1972, ia mengabdikan diri sebagai Wakil Bupati TTU periode 2005–2010 sebelum akhirnya terpilih menjadi Bupati TTU selama dua periode, dari 2010 hingga 2021.

Di bawah kepemimpinannya, TTU mengalami berbagai kemajuan di sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepergiannya membawa duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta masyarakat TTU yang mengenalnya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan penuh kepedulian.

Sejumlah tokoh daerah serta masyarakat luas menyampaikan belasungkawa, mengenang jasanya dalam membangun daerah dan memperjuangkan kesejahteraan warga.

Saat ini, jenazah Raymundus telah diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan sesuai adat istiadat setempat.

Sementara itu, pihak berwenang masih mendalami insiden ini guna memastikan penyebab pasti tenggelamnya perahu yang merenggut nyawa mantan bupati tersebut.

Kepergian Raymundus Sau Fernandes menjadi kehilangan besar bagi TTU. Warisannya sebagai pemimpin yang berdedikasi akan terus dikenang oleh masyarakat yang pernah dipimpinnya. ***

Mitra BGN Kupang Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis



Kupang, nwartapedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah mendapat dukungan penuh dari mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan kerja Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) BGN, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha dan Direktur Tawas, Kol Armed Rudi Setiawan, S.IP., M.Han, mitra MBG di Kupang menyampaikan komitmennya untuk menyukseskan program ini.

Antonio PD Sarmento, salah satu mitra BGN di Kota Kupang, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah dalam implementasi program MBG.

“Kami sangat mendukung program MBG ini. Kami akan melaksanakan arahan Pak Deputi. Ini bukti cinta kami untuk Pak Prabowo yang melahirkan program MBG ini. Kami berharap dukungan masyarakat untuk menyukseskan program ini,” ujar Antonio pada Kamis (20/03/2025).

Selain mendapatkan dukungan dari mitra BGN, program ini juga diapresiasi oleh PIC Yayasan No Fitu Timor di SPPG Noelbaki, Rita Wadu. Menurutnya, keberhasilan MBG di NTT sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara SPPI, yayasan, dan

mitra BGN.

“Program ini sangat penting, apalagi untuk NTT yang angka stuntingnya masih tinggi serta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia. MBG juga memberi ruang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ungkap Rita.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang telah mencetuskan program ini.

“Terima kasih Bapak Prabowo atas program luar biasa ini. Kami berharap program ini terus berjalan dan semakin berkembang untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra BGN dan yayasan di daerah, implementasi Makan Bergizi Gratis di NTT diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. **

Deputi Tawas BGN Tinjau Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di NTT



Kupang, nwartapedia.com – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat dukungan penuh dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) Badan Gizi Nasional I (BGN).

Untuk memastikan kelancaran program, Deputi Tawas BGN, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha, bersama Direktur Tawas, Kol Armed Rudi Setiawan, S.IP., M.Han melakukan kunjungan langsung ke Kota Kupang, ibukota NTT, pada Kamis (20/3).

Dalam kunjungan ini, Deputi Tawas BGN menginspeksi dapur mandiri MBG di Kecamatan Oebobo, yakni dapur Kota Kupang Oebobo.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung aktivitas penyediaan makanan bergizi, mengevaluasi sarana dan prasarana, serta memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) MBG telah diterapkan dengan baik.

Setelah kunjungan lapangan, pertemuan dengan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yayasan, dan mitra BGN digelar di Hotel Harper Kupang.

Acara ini diadakan secara hybrid, dihadiri 40 peserta secara langsung, serta lebih dari 80 peserta dari berbagai kabupaten yang mengikuti secara daring melalui Zoom.

Deputi Tawas BGN menekankan bahwa pertemuan ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman terkait regulasi dan kebijakan MBG, sekaligus menjadi wadah bagi dapur-dapur yang telah beroperasi untuk berbagi pengalaman dan kendala yang dihadapi.

“Saat ini di NTT sudah ada 65 SPPI, terdiri dari 18 dari batch 1 dan 47 dari batch 2, dan saat ini sedang dipersiapkan batch 3. Target kami di tahun 2025 adalah mendirikan 498 dapur MBG di seluruh NTT,” ujar Deputi Tawas BGN.

Beliau juga menjelaskan bahwa BGN berdiri berdasarkan

Keputusan Presiden (Keppres) No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Hingga saat ini, telah terbentuk 745 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dengan total 2.162.585 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Target BGN tahun 2025 adalah membangun 5.000 SPPG di seluruh Indonesia yang melayani 15 – 17,5 juta penerima manfaat, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Karena itu, ada tiga kunci sukses MBG yang harus diperhatikan, yaitu anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia,” jelasnya.

Beliau juga mengingatkan agar semua pihak, termasuk SPPI, yayasan, dan mitra, bersinergi untuk menyukseskan program MBG.

“SPPI sebagai kepala SPPG, yayasan, dan mitra memiliki tugas dan peran masing-masing. Jalankan tanggung jawab secara profesional, tingkatkan komunikasi dan koordinasi, agar program MBG dapat berjalan dengan sukses,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Deputi Tawas BGN menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Anggaran untuk bahan baku, sewa, dan operasional harus digunakan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada pemotongan anggaran oleh yayasan atau mitra, karena penggunaan dana ini akan diaudit oleh Inspektorat Utama BGN, BPKP, BPK, dan KPK,” ujarnya.

Mitra BGN di Kota Kupang, Antonio PD Sarmiento, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan Deputi dan Direktur Tawas ke dapur MBG Oebobo.

“Kami sangat mendukung program MBG ini dan siap melaksanakan arahan Pak Deputi. Ini adalah bukti kecintaan kami kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah melahirkan program MBG ini. Kami berharap masyarakat juga ikut mendukung agar program ini berjalan sukses,” ungkapnya.

Sementara itu, Rita Wadu, PIC Yayasan No Fitu Timor di SPPG Noelbaki, menilai bahwa kerja sama antara SPPI, yayasan, dan mitra menjadi faktor kunci dalam keberhasilan MBG.

“Program ini sangat penting, terutama bagi NTT yang masih menghadapi angka stunting tinggi serta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia,”katanya.

“MBG juga memberikan peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Terima kasih kepada Bapak Prabowo atas program luar biasa ini,” tambahnya. ***

Jaga Stabilitas Harga di Bulan Ramadan, Wawali Kota Kupang Buka Gerakan Pangan Murah



Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) 2025 untuk menekan gejolak harga bahan pokok selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., di halaman Masjid Al-Muhajirin Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kamis (20/3).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Forkopimda Kota Kupang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang Ignasius Repelita Lega, S.H., Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Oebufu Imam H. Idri Mochdar, S.Sos., serta jajaran dinas terkait, perwakilan distributor pangan, Perum Bulog, Bank Indonesia, dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) seperti Hari Raya Nyepi, Idulfitri, dan Paskah.

“Menjelang hari raya, permintaan bahan pokok meningkat yang berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi. GPM hadir sebagai solusi untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Serena.

Berbagai komoditas dijual dengan harga di bawah harga pasar, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, sayuran, dan bahan pokok lainnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Serena juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkomitmen dan konsisten dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Kupang.

“Tanpa komitmen, kita tidak dapat memulai sebuah pekerjaan, dan tanpa konsistensi, kita tidak dapat menyelesaikannya,” tegasnya.

Wakil Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pangan, serta berbagai instansi terkait, termasuk Perum Bulog, distributor pangan, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan para pelaku usaha.

Selain itu, Serena juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi di Kota Kupang. Saat ini, inflasi di Kota Kupang berada di level 0,01 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Capaian ini berkat kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Wali Kota menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama.

“Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama,” ujar Serena mengutip peribahasa.

Serena juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Pemkot Kupang untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, antara lain

Sidak Pasar Bersama Forkopimda untuk memastikan tidak ada praktik spekulasi harga.

Gerakan Tanam Jagung untuk meningkatkan produksi pangan lokal.

Kerja Sama dengan Daerah Penghasil Komoditas untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap lancar.

Pelaksanaan Pasar Murah di 51 Kelurahan untuk memperluas jangkauan GPM.

Operasi Pasar melalui GPM untuk menekan lonjakan harga bahan pangan.

“Semua upaya ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga daya beli

masyarakat. To govern is to serve, memerintah adalah melayani," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.

Berdasarkan pantauan Pemkot, stok bahan pokok di Kota Kupang menjelang Idulfitri dalam kondisi aman dan harga relatif stabil.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Ir. Vera Cendana Wati Ello, menegaskan bahwa tujuan utama GPM adalah memberikan kemudahan akses pangan murah bagi masyarakat.

Program ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Oebufu, Imam H. Idri Mochdar, S.Sos., juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Kupang dalam menggelar GPM di lingkungan masjid.

"Kami sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Semoga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau," katanya.

Usai membuka acara, Wakil Wali Kota meninjau langsung lapak-lapak penjual bahan pangan dan turut membeli beberapa komoditas seperti telur, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan cabai rawit.

Kehadirannya di tengah masyarakat menunjukkan dukungan nyata Pemkot Kupang dalam memastikan program pangan murah berjalan dengan lancar. ***

Menteri UMKM Maman Abdurahman Tegaskan UMKM NTT Adalah Prioritas Utama



Jakarta, nwartapedia.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh perkembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pertemuan bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan para kepala daerah se-NTT di kantor Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Menteri Maman menyampaikan bahwa pihaknya siap mengikuti setiap arahan dari Pemprov NTT demi kemajuan UMKM di wilayah tersebut.

“UMKM NTT adalah prioritas utama saya. Semua instruksi Pak Gubernur NTT untuk UMKM, saya dukung penuh!” tegas Menteri Maman.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Maman menegaskan bahwa Kementerian UMKM mendukung penuh program One Village One Product yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Program ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi produk

unggulan desa agar memiliki nilai tambah serta daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional.

Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM akan menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di NTT pada Oktober 2025.

Acara ini akan menjadi ajang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, mendapatkan akses permodalan, serta perlindungan usaha.

Festival ini juga akan melibatkan berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), BPOM, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Askrindo, Jamkrindo, serta kementerian terkait lainnya.

“Festival ini adalah kesempatan emas bagi UMKM NTT untuk berkembang lebih pesat. Kami akan memastikan seluruh dukungan yang dibutuhkan tersedia,” ujar Menteri Maman.

Menteri Maman mengidentifikasi dua tantangan utama yang masih dihadapi UMKM di NTT, yaitu Akses Pendanaan – Banyak pelaku UMKM masih kesulitan memperoleh modal usaha dan Persaingan dengan Pemain Besar – Pasar masih didominasi oleh perusahaan besar, sehingga UMKM sulit bersaing.

Untuk mengatasi permasalahan pendanaan, Kementerian UMKM akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun melalui Bank NTT.

Namun, Menteri Maman menegaskan bahwa pencairan dana ini bergantung pada kesiapan Bank NTT dalam memenuhi persyaratan administratif, transparansi laporan keuangan, serta likuiditas yang kuat.

“Saya ingin Bank NTT menunjukkan komitmen mereka. Jika mereka bisa memenuhi standar yang ditetapkan, kami akan segera mengucurkan dana KUR ini agar benar-benar bermanfaat bagi UMKM di NTT,” kata Maman.

Selain pendanaan, Menteri Maman juga menegaskan pentingnya perlindungan negara terhadap UMKM, termasuk dalam bentuk insentif pajak dan kebijakan afirmatif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah akan memastikan

40 persen belanja daerah dialokasikan untuk produk UMKM.

30 persen infrastruktur publik disediakan untuk penjualan UMKM.

30 persen biaya sewa tempat promosi lebih rendah dibandingkan tarif komersial.

50 persen keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

“Kami ingin UMKM NTT memiliki daya saing kuat dan terus berkembang. Dengan perlindungan serta kebijakan afirmatif ini, saya yakin UMKM bisa naik kelas,” ujar Maman.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik dukungan dari Kementerian UMKM. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memajukan UMKM di NTT.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap UMKM di NTT. Festival UMKM nanti akan menjadi momentum besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Gubernur Melki.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan UMKM di NTT semakin maju, memiliki daya saing tinggi, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional. ***

BPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran 2025



Jakarta, nwartapedia.com – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025.

Kebijakan khusus ini diambil guna mengantisipasi potensi kendala akses pelayanan di masa liburan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).

Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00

– 12.00 waktu setempat.

Selain itu, pada layanan PANDAWA dapat diakses oleh peserta setiap hari selama 24 jam.

“Adapun jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan. Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS

Kesehatan,” kata Ghufron pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/03).

Ghufron mengungkapkan dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam Program JKN, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar.

Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

“Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar,” jelasnya.

“Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” tambah Ghufron.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menambahkan penjaminan dan prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di

fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP).

Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan.

Sementara itu, selama libur lebaran, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP.

Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis.

“Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif. Jika status kepesertaan JKN-nya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan untuk melunasi tunggakan tersebut.

Apabila peserta merasa berat untuk melunasi tunggakan sekaligus, peserta bisa memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang terdapat di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan satu juta kanal pembayaran yang memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran JKN,” tambah Lily.

Dalam mengantisipasi arus mudik yang tinggi, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan Posko Mudik di tujuh titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik.

Posko ini tidak hanya memberikan pelayanan kepesertaan JKN, tetapi juga siap menangani keadaan darurat dengan menyediakan obat-obatan dan rujukan medis apabila diperlukan.

Adapun titik posko yang dihadirkan BPJS Kesehatan pada masa

libur lebaran yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka dan Posko Arus Balik terdapat di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.

“Harapannya, komitmen yang ditunjukkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran ini juga didukung oleh seluruh mitra fasilitas kesehatan. Dengan terbukanya akses bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan di masa libur lebaran, diharapkan fasilitas kesehatan juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta, termasuk bagi mereka yang tengah menjalani mudik lebaran,” tutupnya.***

Informasi lebih lanjut hubungi:
Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
humas@bpjs-kesehatan.go.id
Website www.bpjs-kesehatan.go.id

Gubernur NTT dan Kepala Daerah Se-NTT Bahas Program Gizi dan Pendidikan dengan Pemerintah Pusat



Jakarta, nwartapedia.com – Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama para Bupati/Wali Kota se-NTT, melaksanakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, guna memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan di NTT.

Pertemuan pertama berlangsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat akan mengalokasikan dana sebesar Rp9 triliun untuk membangun 696 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT, guna meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong perekonomian lokal.

“Saat ini di NTT baru terdapat 17 SPPG. Dengan adanya tambahan 696 SPPG, layanan pemenuhan gizi akan mencakup 1,5 juta siswa, dengan setiap unit rata-rata melayani 3.000 anak. Dari total anggaran, 85% akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 15% lainnya dialokasikan untuk pembiayaan jasa, termasuk tenaga pemasak dan pekerja lainnya,” jelas Dadan Hindayana.

Kebijakan ini disambut positif oleh Gubernur dan Para Kepala Daerah se-NTT, mengingat dampaknya yang besar bagi

kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

“Kami menyambut baik program ini karena memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Dana Rp9 triliun ini jumlahnya dua kali lipat dari APBD NTT. Ini kesempatan besar bagi kami untuk menggerakkan ekonomi rakyat guna mendukung Program MBG,” ujar Gubernur Melki Laka Lena.

Setelah pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, Gubernur Melki Laka Lena beserta rombongan melanjutkan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, beserta jajarannya di Kemendikdasmen RI.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah NTT dan Kemendikdasmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di NTT, terutama dalam memastikan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas.

“Kami melakukan pertemuan bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di NTT. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di NTT dapat tercapai melalui sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Kemendikdasmen,” ungkap Gubernur Melki.

Kedua pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat dalam membangun sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang merupakan pilar utama pembangunan manusia.

Dengan adanya investasi besar dalam gizi anak-anak dan peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan generasi muda NTT dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah serta bangsa. ***